



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jln. Jendral Sudirman Painan – Sago Telp/Fax (0756) 7464239



# **RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)**

## **TAHUN 2019**



**DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT, karena hanya berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 dapat diselesaikan.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan uraian tentang upaya pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan resiko, yang meliputi upaya penguatan lingkungan pengendalian dan penguatan struktur, kebijakan dan prosedur organisasi untuk mengendalikan resiko.

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian mengacu kepada lima unsur pengendalian intern, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi dan pemantauan/monitoring. Informasi untuk mempersiapkan rencana tindak pengendalian intern diperoleh dari hasil evaluasi, penilaian atau pemetaan atas sistem pengendalian intern yang ada, dengan memperhatikan struktur dan praktek tata kelola organisasi.

Diperlukan komitmen dari semua pihak yang terkait untuk melaksanakan rekomendasi yang muncul dalam Laporan Rencana Tindak Pengendalian Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan Rencana Tindak Pengendalian ini, kami mengucapkan terima kasih. Kami berharap agar Rencana Tindak Pengendalian ini bermanfaat dan memiliki kontribusi konkrit bagi upaya pencapaian tujuan organisasi.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PESIR SELATAN



**GUNAWAN, S.Sos.M.Si**  
Pemangku Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19700204 199101 1 002

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar isi .....	ii
I. Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	2
C. Maksud dan Tujuan .....	3
D. Ruang Lingkup .....	3
II. Sekilas Tentang SPIP .....	3
A. Pengertian .....	3
B. Tujuan SPIP .....	4
C. Unsur-unsur SPIP .....	4
1. Lingkungan Pengendalian .....	4
2. Penilaian Resiko .....	5
3. Kegiatan Pengendalian .....	5
4. Informasi dan Komunikasi .....	6
5. Pemantauan Berkelanjutan .....	7
D. Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibilities)....	7
III. Penciptaan Lingkungan Pengendalian Yang Diharapkan .....	8
A. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalianj Yang baik .....	8
B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini .....	8
C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian .....	10
IV. RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN.....	12
A. Pernyataan Tujuan .....	12
B. Risiko-risiko .....	12
C. Kegiatan Pengendalian Terpasang .....	14
D. Kegiatan Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan .....	16
V. INFORMASI DAN KOMUNIKASI.....	19
VI. PEMANTAUAN DAN EVALUASI.....	21
VII. PENUTUP .....	23
Lampiran .....	24 – 52

**RENCANA TINDAK PENGENDALIAN**  
**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**TAHUN 2019**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penerapan Pengendalian Intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP), sebagai acuan bagi penyelenggara tugas dan fungsi organisasi, sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menerbitkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan terbitnya Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2011 merupakan pondasi Penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi dibidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan good governance sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN, maka diperlukan Sistem Pengendalian Intern dalam mengelola keuangan negara.

Selanjutnya terkait dengan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, yang diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

dalam Pasal 12 disebutkan bahwa dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksaan melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam pengendalian resiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya.

Rencana Tindak Pengendalian SPIP ditetapkan sebagai wujud pelaksanaan SPIP secara menyeluruh dalam penyelenggaraan tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan. Rencana Tindak Pengendalian merupakan uraian mengenai rencana tindak penguatan SPIP baik dalam bentuk pembangunan lingkungan pengendalian maupun infrastruktur kebijakan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan sehingga diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan, visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

## B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 700/58/Kpts/BPT-PS/2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Implementasi Sistem Pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017.

### C. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana Tindak Pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

### D. Ruang Lingkup

Rencana Tindak Pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan. Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkat manajemen, pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan. Realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian diharapkan dalam Tahun 2019.

## II. SEKILAS TENTANG SPIP

### A. Pengertian SPIP

Menurut Ketentuan Umum PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk

memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/daerah yang diamanatkan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

## B. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

## C. Unsur – unsur SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern sebagai berikut:

### 1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu Instansi Pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu atmosfer yang

kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang sangat penting karena pemimpin berperan sebagai *tone at the top* (penentu "irama" organisasi), perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Perwujudan peran aparat Pengawas Intern Pemerintah yang efektif;
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

## 2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

## 3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan



pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan.

Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pada pengendalian dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu *prevention and mitigation*. Pengendalian yang bersifat *prevention* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat *mitigation* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian lebih diutamakan pada kegiatan pokok organisasi dan relevan dengan hasil kegiatan penilaian risiko, sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian mampu membantu memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai.

#### 4. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, untuk memperoleh informasi yang berguna mengumpulkan dan mengolah data sehingga menjadi informasi dari data-data tersebut informasi yang diharapkan lebih terarah dan penting karena telah dilalui berbagai tahap dalam pengolahannya. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung-jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung-jawabnya sehubungan dengan

pengendalian intern.

#### 5. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern. Dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya dapat ditindaklanjuti. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

#### D. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/WaliKota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa Sistem Pengendalian Intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan Sistem Pengendalian Intern yang ada, Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan pernyataan pimpinan mengenai kondisi SPIP. Hal ini disebabkan sejauh mana realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian menunjukkan sejauh mana pengendalian telah dijalankan.

### III. PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

#### A. Tujuan Terciptanya Lingkungan Pengendalian yang Baik

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya Sistem Pengendalian Intern secara efektif dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk:

1. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
4. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
5. Terwujudnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang berperan efektif; dan
6. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

#### B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini

Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan mengambil langkah strategis yaitu:

1. Rekapitulasi Evaluasi Lingkungan Pengendalian seluruh lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

Seluruh lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan (3 Bidang dan 1 Sekretariat) telah melaksanakan survey persepsi melalui kuesioner Control Environment Evaluation (CEE) yang tertuang dalam RTP masing-

masing. Oleh karena itu, Satgas perlu melakukan Rekapitulasi pernyataan-pernyataan Lingkungan Pengendalian seluruh bidang dan sekretariat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Melakukan Skoring dengan fokus pernyataan sub-sub unsur Lingkungan Pengendalian, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1:

Skoring Penilaian Terhadap Lingkungan Pengendalian

No	Skor	Keterangan
1.	1	Tidak Memadai
2.	2	Kurang Memadai
3.	3	Cukup Memadai
4.	4	Memadai

3. Merumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan untuk menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efektif dan efisien dari seluruh pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, diperoleh gambaran yang tertuang pada tabel dibawah ini:

Tabel 2: Penilaian terhadap lingkungan Pengendalian

No.	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas Dan Nilai Etika	Cukup Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Cukup Memadai
3.	Kepemimpinan yang Kondusif	Cukup Memadai
4.	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Belum Memadai

5.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat	Cukup Memadai
6.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia	Cukup Memadai
7.	Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif	Cukup Memadai
8.	Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Cukup Memadai

### C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan menginginkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi. Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dirumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian menunjukkan masih adanya kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki.

Atas kelemahan lingkungan pengendalian lingkungan yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No.	Sub Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/Penguatan Lingkungan Pengendalian
I	Penegakan Integritas Dan Nilai Etika	Kode etik Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan hanya berupa surat edaran Bupati Pesisir Selatan.
		Mensosialisasikan Kode Etik tersebut ke seluruh aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
		Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur atau pelanggaran terhadap aturan kode etik.

II	Komitmen terhadap Kompetensi	Menyusun Standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
		Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi di Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
		Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya
III	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan (disesuaikan dengan tipologi SOTK Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan)
		Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab pimpinan masing-masing pejabat dalam Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
IV	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab	Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
		Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud diatas memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain di Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
		Pegawai yang diberi wewenang tersebut diatas memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP
V	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia	Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai
		Memberikan prioritas pengembangan SDM Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan untuk menunjang kegiatan
VI	Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif	Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
		Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas

		manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
		Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
VII	Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Diwujudkan dengan adanya mekanisme hubungan kerjasama yang baik antar instansi yang terkait dengan rapat-rapat Koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah

#### IV. RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN

##### A. Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam Tahun 2019, Rencana Tindak Pengendalian yang disusun Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan-tujuan dan sasaran.

##### Tujuan :

***Meningkatnya keselamatan transportasi***

##### Sasaran :

- 1. Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang handal**
- 2. Meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas**

##### B. Risiko-risiko

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan atas resiko yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

Risiko Pencapaian Sasaran 1 :

- Minimnya alat keselamatan lalu lintas dalam kondisi baik
- Tidak berfungsinya fasilitas pos retribusi sebagaimana mestinya
- Minimnya penerangan jalan umum dalam kondisi baik dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya
- Minimnya kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana transportasi pedesaan
- Kurangnya pengembangan pelabuhan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan
- Minimnya jasa transportasi bagi pelajar yang tinggal di daerah terisolir
- Tidak adanya tempat pemberhentian Bus dan fasilitas perparkiran sehingga tidak tertatanya arus kendaraan dengan baik
- Tidak adanya jaminan keselamatan secara teknis dan pencemaran udara

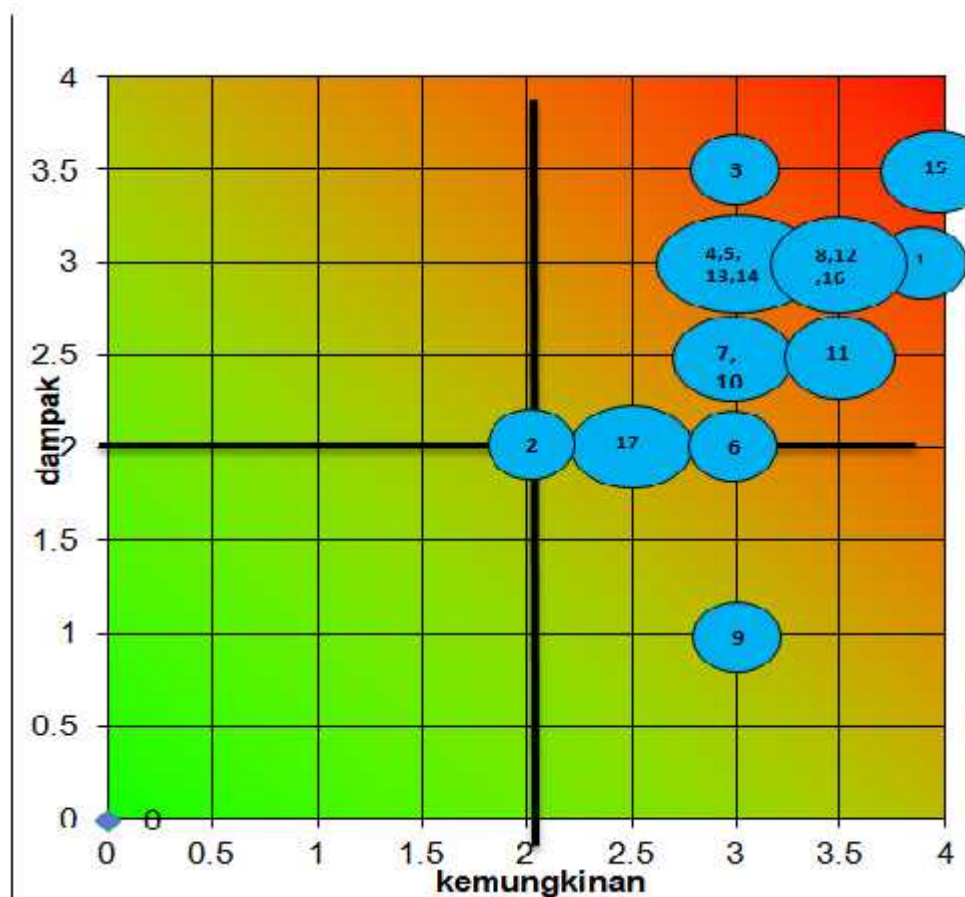
Risiko Pencapaian Sasaran 2 :

- Kurangnya penerangan jalan umum bagi pengguna jalan dan masyarakat pada malam hari sehingga jalan yang dilalui tidak dapat dilihat dengan jelas
- Kurangnya petunjuk atau arah bagi pengguna jalan sehingga dapat mengakibatkan kecelakaan
- Kurangnya tersedianya sarana alat keselamatan lalu lintas
- Kurangnya aparatur yang memiliki kompetensi dibidang penertiban dan pembinaan lalu lintas angkutan laut
- Kurangnya informasi kepada pelajar akan pentingnya keselamatan di jalan
- Minimnya pengetahuan sopir akan etika berkendara dan berlalu lintas sehingga dapat mengakibatkan kecelakaan
- Kurangnya pemenuhan aparatur dalam pemberian pelayanan terhadap pengamanan Jalan yang mengatur arus lalu lintas
- Kurangnya pemenuhan aparatur dalam pemberian pelayanan pengamanan lalu lintas angkutan laut
- Kurangnya kesadaran masyarakat mencintai budaya tertib berlalu lintas



Hasil analisis atas risiko-risiko dimaksud memperlihatkan peta risiko sebagai berikut :

## PETA RESIKO



Rincian risiko teridentifikasi tertuang dalam lampiran 2

### C. Kegiatan Pengendalian Terpasang

Sampai saat ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan telah membangun berbagai pengendalian untuk pencapaian sasaran pada tujuan yang diemban oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan. Beberapa pengendalian tersebut dapat dinilai telah efektif, namun beberapa pengendalian lainnya yang telah dilaksanakan kurang/tidak efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan dimaksud. Pengendalian yang telah dilakukan antara

lain sebagai berikut :

1. Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat Keselamatan Lalu Lintas  
Rehabilitasi alat keselamatan lalu lintas (Traffic light dan Rambu-Rambu lalu lintas)
2. Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pos Retribusi (TPR)  
Rehabilitasi Pos Terpadu Panadah dan Pos Retribusi Siguntur
3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Penerangan Jalan Umum  
Melakukan penggantian terhadap komponen PJU yang rusak berdasarkan hasil survey ke lapangan dan laporan dari masyarakat
4. Kegiatan Pembangunan Fasilitas Transportasi Pedesaan (DAK)  
Menghibahkan transportasi pedesaan kepada BUMNAG di Kecamatan Koto XI Tarusan, Kecamatan Sutera, Kecamatan Lengayang, Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut
5. Kegiatan Pengembangan Pembangunan Pelabuhan  
Pembangunan Dermaga/Penyeberangan
6. Kegiatan Operasional Pelayanan Transportasi Pendidikan  
Melayani kebutuhan pelajar akan jasa transportasi di Kecamatan Koto XI Tarusan dan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
7. Kegiatan Pelayanan Terminal dan Perparkiran  
Memberikan pelayanan fasilitas perparkiran di kawasan objek wisata (Carocok Painan), Rumah Sakit dan Pasar Inpres Painan
8. Kegiatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor  
Melayani pemilik kendaraan bermotor yang melakukan uji pertama, uji ulang dan numpang uji serta uji keliling
9. Kegiatan Pembangunan Penerangan Jalan Umum  
Melakukan pemasangan penerangan jalan umum dititik rawan kecelakaan
10. Kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu RPPJ  
Melakukan pemasangan Rambu-Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan pada titik rawan kecelakaan sehingga adanya petunjuk bagi pengguna jalan
11. Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Alat Keselamatan Lalu Lintas  
Melakukan pemasangan alat keselamatan lalu pada titik rawan

kecelakaan sehingga adanya petunjuk bagi pengguna jalan

12. Pembinaan dan Penertiban Lalu Lintas Angkutan Laut

Melakukan sosialisasi terhadap pemilik kapal tentang keselamatan pelayaran, penerbitan pas kecil dibawah GT 7 dan kelengkapan dokumen kapal disetiap Kecamatan

13. Kegiatan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas

Pemilihan pelajar pelopor keselamatan berlalu lintas tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional

14. Kegiatan Pemilihan Sopir Teladan (Abiyasa)

Pemilihan sopir teladan tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional

15. Kegiatan Pengawasan dan pengendalian LLAJ

Pengawasan dan pengendalian arus lalu lintas (PAM pada titik-titik yang rawan kecelakaan/tempat keramaian)

16. Kegiatan Operasional Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Laut

Pengamanan dan pengawasan lalu lintas angkutan laut di pantai Carocok Painan dan pantai Carocok Tarusan

17. Kegiatan Penunjang Wahana Tata Nugraha

Melakukan Razia gabungan tentang keselamatan berlalu lintas

D. Kegiatan Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan

**Tujuan 1** : Tersedianya alat keselamatan lalu lintas dalam kondisi baik

*Merehabilitasi seluruh alat keselamatan jalan yang rusak dan mengembalikan fungsi rambu-rambu sebagai media informasi bagi pengguna jalan*

**Tujuan 2** : Berfungsi dan adanya fasilitas di pos retribusi sebagaimana mestinya

*Rehabilitasi ke tiga Pos Retribusi (TPR) yaitu Pos Terpadu Panadah, Pos Retribusi Siguntur dan Terminal Silaut*

**Tujuan 3** : Tersedianya penerangan jalan umum dalam kondisi baik dan berfungsi sebagaimana mestinya

*Melakukan pendataan terhadap penerangan jalan umum yang rusak di setiap Nagari dan Kecamatan agar dapat direhabilitasi*

- Tujuan 4** : Memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana transportasi pedesaan  
*Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana transportasi pedesaan bagi masyarakat terisolir yang ada di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat*
- Tujuan 5** : Meningkatkan pengembangan pembangunan pelabuhan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan  
*Terbangunnya Dermaga/penyeberangan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan*
- Tujuan 6** : Untuk meningkatkan pelayanan jasa transportasi kepada pelajar dalam rangka menjemput/mengantarkan ke tempat tujuan sehingga terciptanya Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)  
*Melayani kebutuhan pelajar akan jasa transportasi di setiap kecamatan yang membutuhkan*
- Tujuan 7** : Memberikan pelayanan/fasilitas kepada masyarakat dalam rangka menurunkan/menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi, mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum serta memberikan fasilitas parkir dalam pengaturan tempat kendaraan bermotor  
*Pengisian kantong-kantong parkir di setiap objek wisata*
- Tujuan 8** : Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan dan melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan penggunaan kendaraan bermotor di jalan serta meningkatnya moda transportasi laik jalan  
*Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya melakukan pengujian kendaraan bermotor sehingga kendaraan tersebut laik jalan dan terhindar dari resiko kecelakaan*

- Tujuan 9** : Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan penerangan jalan umum  
*Melakukan pendataan terhadap kebutuhan PJU yang dibutuhkan/dipasang disetiap Nagari dan Kecamatan*
- Tujuan 10** : Adanya petunjuk atau arah bagi pengguna jalan sehingga kecelakaan dapat di minimalisir  
*Melakukan pendataan terhadap kebutuhan RPPJ yang dibutuhkan/dipasang disetiap lokasi yang rawan kecelakaan*
- Tujuan 11** : Tersedianya sarana alat keselamatan Lalu Lintas  
*Melakukan pendataan terhadap kebutuhan fasilitas keselamatan yang dibutuhkan/dipasang disetiap lokasi yang rawan kecelakaan*
- Tujuan 12** : Adanya pemahaman pemilik kapal dan pengguna jasa transportasi angkutan laut akan pentingnya keselamatan dalam pengoperasian kapal dan berlalu lintas di laut  
*Sosialisasi terhadap pemilik kapal tentang keselamatan pelayaran, penerbitan pas kecil dibawah GT 7 dan kelengkapan dokumen kapal disetiap Kecamatan*
- Tujuan 13** : Terpilihnya pelajar pelopor keselamatan berlalu lintas yang akan menjadi duta keselamatan ditingkat pelajar  
*Melakukan sosialisasi keselamatan berlalu lintas, masing-masing 2 sekolah setiap Kecamatan yang ada diwilayah Kabupaten Pesisir Selatan*
- Tujuan 14** : Terpilihnya sopir teladan dalam rangka memotivasi sopir-sopir lainnya untuk tertib dalam berkendara dan memperhatikan faktor keselamatan penumpang  
*Memberikan pelatihan/workshop kepada para sopir tentang tata cara berkendara yang baik*
- Tujuan 15** : Terciptanya arus lalu lintas yang aman, lancar, tertib, terkendali dan selamat  
*Pemberian pelatihan dasar lalu lintas angkutan dan jalan bagi petugas STPJ*

**Tujuan 16** : Terciptanya ketertiban dan kepatuhan pemilik dan pengguna kapal dalam pengoperasian kapal dalam rangka meningkatkan keselamatan

*Pemeriksaan alat keselamatan pelayaran (kapal) dan muatan/jumlah penumpang kapal*

**Tujuan 17** : Untuk meningkatkan penyelenggaraan transportasi yang handal, berkelanjutan dan menjamin kesamaan hak pengguna jalan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam disiplin berlalu-lintas

*Pemberian sosialisasi tertib berlalu lintas kepada masyarakat dalam rangka penilaian Wahana Tata Nugaraha Kategori Kota Kecil*

## **V. INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mendukung jalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai dengan rencana dalam RTP adalah :

a. Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat Keselamatan Lalu Lintas

- Rapat, surat tugas, laporan kegiatan, laporan dari petugas/masyarakat
- Data Aset

b. Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pos Retribusi (TPR)

- Rapat, surat, surat tugas dan laporan petugas pemugut retribusi
- Data Aset

c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Penerangan Jalan Umum

- Rapat koordinasi, surat, surat tugas
- Laporan kegiatan dan data penerangan jalan umum
- WA, SMS dan Telepon
-

- d. Kegiatan Fasilitas Transportasi Pedesaan (DAK)
  - Renja, Rapat, Surat dan surat tugas
  - Internet, telepon
- e. Kegiatan Pengembangan Pembangunan Pelabuhan
  - Renja, Rapat, Surat
  - surat tugas
- f. Kegiatan Operasional Transportasi Pelayanan Pendidikan
  - Rapat, surat tugas
  - laporan kegiatan
- g. Kegiatan Pelayanan Terminal dan Perparkiran
  - Rapat, Surat, surat tugas, karcis, laporan kegiatan
  - Instruksi pimpinan, arahan lisan
- h. Kegiatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
  - Kendaraan
  - Buku, Stiker dan Plat Uji
  - Amprah, SKRD, Laptop dan Printer
- i. Kegiatan Pembangunan Penerangan Jalan Umum
  - Rapat koordinasi, surat, surat tugas, laporan kegiatan
  - Data penerangan jalan umum
- j. Kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu RPPJ
  - Rapat koordinasi, surat, surat tugas
  - Laporan kegiatan dan data RPPJ
- k. Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Alat Keselamatan Lalu Lintas
  - Rapat koordinasi, surat, surat tugas
  - Laporan kegiatan dan data alat keselamatan lalu lintas
- l. Kegiatan Pembinaan dan Penertiban Lalu Lintas Angkutan Laut
  - Rapat, surat tugas, surat undangan
  - Spanduk, Makalah/bahan sosialisasi, laporan kegiatan, ATK dan daftar hadir peserta
- m. Kegiatan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Ber Lalu Lintas
  - Rapat, surat tugas, surat undangan, laporan kegiatan
  - Makalah, daftar hadi peserta, ATK dan formulir penilaian

- n. Kegiatan Pemilihan Sopir Teladan (Abiyasa)
  - Rapat, surat tugas, surat undangan, laporan kegiatan
  - Makalah, daftar hadi peserta, ATK dan formulir penilaian
- o. Kegiatan Pengawasan dan pengendalian LLAJ
  - Rapat, surat tugas, instruksi pimpinan, arahan lisan
  - Laporan petugas Satuan Pengamanan Jalan
- p. Kegiatan Operasional Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Laut
  - Rapat, surat tugas, instruksi pimpinan, arahan lisan
  - Laporan petugas
- q. Kegiatan Penunjang Kegiatan Wahana Tata Nugraha
  - Rapat koordinasi, surat undangan, surat tugas
  - Laporan kegiatan dan pengisian formulir penilaian WTN

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam lampiran 4.

## **VI. PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditunjukkan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan yang diperlukan dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi :

### **1. Pemantauan Berkelanjutan**

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Pemantauan yang dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan adalah Pemantauan Berkelanjutan. Masing-masing unit kerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai pemilik risiko akan melakukan pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan atau Bidang pada setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan uraian tugas masing-masing. Pemantauan berkelanjutan di Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan risiko-risiko yang ada



meliputi sebagai berikut:

- Pemantauan terhadap pembentukan pelaksanaan kode etik di Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Pemantauan terhadap SOP kegiatan yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Pemantauan dan Evaluasi atas penerapan standar kompetensi dan penempatan SDM.
- Pemantauan terhadap serapan atau realisasi belanja APBD Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

Rincian Pemantauan berkelanjutan yang akan dilakukan tertuang pada lampiran 5.

## 2. Evaluasi Terpisah

Evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat selaku auditor Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari seluruh kegiatan OPD Kabupaten Pesisir Selatan atau oleh pihak luar seperti BPKP. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif.

## 3. Pelaksanaan Tindak Lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviu dari auditor eksternal maupun internal, setiap unit kerja OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan tindak lanjutnya.

## 4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan laporan atas RTP sesuai tanggung-jawabnya secara berkala kepada Tim pemantau yang dalam hal ini adalah Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil pemantauan tim pemantau dilaporkan kepada Bupati Pesisir Selatan.

## VII. PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian Intern Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 merupakan salah satu dokumen penting dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemantauan atas pelaksanaan sesuai rencana tindak pengendalian ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan *Statement of Responsibility* dalam laporan keuangan.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PESIR SELATAN



**GUNAWAN, S.Sos. M.Si**  
NIP. 19700204 199101 1 002

Lampiran 1

Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian Yang Belum Memadai	Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan Pengendalian	Penanggung Jawab Pelaksanaan perbaikan	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5
1	Komitmen terhadap kompetensi	Sumber Daya Manusia yang memadai dalam melaksanakan strategi dan perencanaan organisasi	Kepala OPD	
2	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang sehat tentang pembinaan Sumber Daya Manusia	Ketersediaan Anggaran dalam pengembangan SDM	Kepala OPD	
3	Desain struktur organisasi belum sesuai dengan ukuran dan karakternya	Revisi Perbub No. 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan	Kepala OPD	

Lampiran 2

DAFTAR RISIKO PRIORITAS TERIDENTIFIKASI

No	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak Pada Capaian Tujuan
1	2	3	4	5
Tujuan 1 : Tersedianya alat keselamatan lalu lintas dalam kondisi baik				
1	Minimnya alat keselamatan lalu lintas dalam kondisi baik	PPTK dan Kabid Prasarana	Banyaknya alat keselamatan lalu lintas yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya	Meningkatnya resiko dan angka kecelakaan lalu lintas
Tujuan 2 : Berfungsi dan adanya fasilitas di pos retribusi sebagaimana mestinya				
1	Tidak berfungsinya fasilitas pos retribusi sebagaimana mestinya	PPTK	Tidak adanya perbaikan pada sarana dan prasarana fasilitas pos retribusi	Kurang nyamannya petugas pemungut retribusi sehingga pemasukan PAD di sektor perhubungan berkurang
Tujuan 3 : Tersedianya penerangan jalan umum dalam kondisi baik dan berfungsi sebagaimana mestinya				
1	Minimnya penerangan jalan umum dalam kondisi baik dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya	PPTK	Tidak terpeliharanya penerangan jalan umum karena keterbatasan anggaran	Tidak tersedianya penerangan jalan umum dalam kondisi baik

1	2	3	4	5
Tujuan 4 : Memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana transportasi pedesaan				
1	Minimnya kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana transportasi pedesaan	PPTK dan Kabid Prasarana	Masih minimnya sarana transportasi pedesaan	Tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan transportasi pedesaan
Tujuan 5 : Meningkatkan pengembangan pembangunan pelabuhan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan				
1	Kurangnya pengembangan pelabuhan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan	PPTK dan Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Masih kurangnya pengembangan pelabuhan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan	Kurangnya pengembangan pelabuhan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan
Tujuan 6 : Untuk meningkatkan pelayanan jasa transportasi kepada pelajar dalam rangka menjemput/mengantarkan ke tempat tujuan sehingga terciptanya Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)				
1	Minimnya jasa transportasi bagi pelajar yang tinggal di daerah terisolir	PPTK	Tidak tersedianya alat transportasi dan biaya operasional	Menurunnya pelayanan jasa transportasi kepada para pelajar dan rendahnya kualitas pendidikan di kalangan masyarakat

1	2	3	4	5
Tujuan 7 : Memberikan pelayanan/fasilitas kepada masyarakat dalam rangka menurunkan/menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi, mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum serta memberikan fasilitas parkir dalam pengaturan tempat kendaraan bermotor				
	Tidak adanya tempat pemberhentian Bus dan fasilitas parkir sehingga tidak tertatanya arus kendaraan dengan baik	PPTK dan Kabid Prasarana	Tidak terkelolanya kualitas pelayanan terminal dan parkir dengan baik	Terjadinya hambatan/kemacetan arus kendaraan dan tingginya resiko kecelakaan
Tujuan 8 : Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan dan melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan penggunaan kendaraan bermotor di jalan serta meningkatnya moda transportasi laik jalan				
1	Tidak adanya jaminan keselamatan secara teknis dan pencemaran udara	PPTK dan Kabid Lalu Lintas dan Angkutan	Banyaknya kendaraan yang tidak laik jalan beroperasi di jalan raya	Meningkatnya resiko kecelakaan dan pencemaran udara akibat beroperasinya kendaraan bermotor yang tidak layak/laik jalan
Tujuan 9 : Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan penerangan jalan umum				
1	Kurangnya penerangan jalan umum bagi pengguna jalan dan masyarakat pada malam hari sehingga jalan yang dilalui tidak dapat dilihat dengan jelas	PPTK dan Kabid Prasarana	Tidak terpasangnya penerangan jalan umum sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Menurunnya keselamatan lalu lintas dan keamanan pengguna jalan dan masyarakat dari kegiatan/aksi kriminal

1	2	3	4	5
Tujuan 10 : Adanya petunjuk atau arah bagi pengguna jalan sehingga kecelakaan dapat di minimalisir				
1	Kurangnya petunjuk atau arah bagi pengguna jalan sehingga dapat mengakibatkan kecelakaan	PPTK dan Kabid Prasarana	Tidak terpasangnya RPPJ sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Tingginya resiko kecelakaan karena tidak adanya petunjuk atau arah bagi pengguna jalan
Tujuan 11 : Tersedianya sarana alat keselamatan Lalu Lintas				
1	Kurangnya tersedianya sarana alat keselamatan lalu lintas	PPTK dan Kabid Prasarana	Tidak terpasangnya alat keselamatan lalu lintas sesuai dengan kebutuhan	Tingginya resiko kecelakaan karena tidak adanya sarana alat keselamatan bagi pengguna jalan
Tujuan 12 : Adanya pemahaman pemilik kapal dan pengguna jasa transportasi angkutan laut akan pentingnya keselamatan dalam pengoperasian kapal dan berlalu lintas di laut				
1	Kurangnya aparatur yang memiliki kompetensi dibidang penertiban dan pembinaan lalu lintas angkutan laut	PPTK dan Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Kurangnya Pembinaan dan Penertiban Lalu Lintas Angkutan Laut terhadap pemilik kapal dan pengguna jasa transportasi laut	Kurangnya pemahaman pemilik moda dan pengguna jasa transportasi akan pentingnya keselamatan

1	2	3	4	5
Tujuan 13 : Terpilihnya pelajar pelopor keselamatan berlalu lintas yang akan menjadi duta keselamatan ditingkat pelajar				
1	Kurangnya informasi kepada pelajar akan pentingnya keselamatan di jalan	PPTK dan Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Tidak adanya pelajar yang akan menjadi pelopor keselamatan di jalan	Tingginya angka kecelakaan tingkat pelajar di jalan raya
Tujuan 14 : Terpilihnya sopir teladan dalam rangka memotivasi sopir-sopir lainnya untuk tertib dalam berkendara dan memperhatikan faktor keselamatan penumpang				
1	Minimnya pengetahuan sopir akan etika berkendara dan berlalu lintas sehingga dapat mengakibatkan kecelakaan	PPTK dan Kabid Lalu Lintas dan Angkutan	Tidak adanya sopir yang akan menjadi acuan dan motivasi bagi pengemudi lainnya	Kurangnya pemahaman sopir tentang keselamatan di jalan
Tujuan 15 : Terciptanya arus lalu lintas yang aman, lancar, tertib, terkendali dan selamat				
1	Kurangnya pemenuhan aparatur dalam pemberian pelayanan terhadap pengamanan Jalan yang mengatur arus lalu lintas	PPTK dan Kabid Lalu Lintas dan Angkutan	Tidak terawasinya pengendara di jalan raya	Meningkatnya resiko dan angka kecelakaan lalu lintas



1	2	3	4	5
Tujuan 16 : Terciptanya ketertiban dan kepatuhan pemilik dan pengguna kapal dalam pengoperasian kapal dalam rangka meningkatkan keselamatan				
1	Kurangnya pemenuhan aparatur dalam pemberian pelayanan pengamanan lalu lintas angkutan laut	PPTK dan Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Tidak terawasinya pengguna dan pemilik kapal angkutan laut dalam pengoperasian kapal	Meningkatnya resiko dan angka kecelakaan lalu lintas laut
Tujuan 17 : Untuk meningkatkan penyelenggaraan transportasi yang handal, berkelanjutan dan menjamin kesamaan hak pengguna jalan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam disiplin berlalu-lintas				
1	Kurangnya kesadaran masyarakat mencintai budaya tertib berlalu lintas	PPTK dan Kabid Lalu Lintas dan Angkutan	Penilaian Wahana Tata Nugraha kategori kota kecil tidak dapat berjalan secara optimal	Meningkatnya resiko dan angka kecelakaan lalu lintas dan piala WTN tidak dapat diperoleh

Lampiran 3

Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian

No	Pernyataan Risiko	Kegiatan Pengendalian yang masih dibutuhkan/ rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian		Penanggung jawab pelaksanaan perbaikan	Target waktu penyelesaian
1	2	3	4	5	6
Tujuan 1 : Tersedianya alat keselamatan lalu lintas dalam kondisi baik					
1	Minimnya alat keselamatan lalu lintas dalam kondisi baik	Merehabilitasi seluruh alat keselamatan jalan yang rusak dan mengembalikan fungsi rambu-rambu sebagai media informasi bagi pengguna jalan	Merehabilitasi seluruh alat keselamatan jalan yang rusak dan mengembalikan fungsi rambu-rambu sebagai media informasi bagi pengguna jalan	PPTK	Februari s/d Desember 2019
Tujuan 2 : Berfungsi dan adanya fasilitas di pos retribusi sebagaimana mestinya					
1	Tidak berfungsinya fasilitas pos retribusi sebagaimana mestinya	Rehabilitasi ke tiga Pos Retribusi (TPR) yaitu Pos Terpadu Panadah, Pos Retribusi Siguntur dan Terminal Silaut	Rehabilitasi ke tiga Pos Retribusi (TPR) yaitu Pos Terpadu Panadah, Pos Retribusi Siguntur dan Terminal Silaut	PPTK	Januari s/d Desember 2018

1	2	3	4	5	6
Tujuan 3 : Tersedianya penerangan jalan umum dalam kondisi baik dan berfungsi sebagaimana mestinya					
1	Minimnya penerangan jalan umum dalam kondisi baik dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya	Penambahan anggaran	Melakukan pendataan terhadap penerangan jalan umum yang rusak di setiap Nagari dan Kecamatan agar dapat direhabilitasi	PPTK	Januari s/d Desember 2019
Tujuan 4 : Memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana transportasi pedesaan					
1	Minimnya kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana transportasi pedesaan	Dapat dipenuhinya kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana transportasi serta mengakomodir hasil musrenbang	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana transportasi pedesaan bagi masyarakat terisolir yang ada diwilayah Kabupaten Pesisir Selatan sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat	PPTK	Juni s/d Desember 2019
Tujuan 5 : Meningkatkan pengembangan pembangunan pelabuhan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan					

1	2	3	4	5	6
1	Kurangnya pengembangan pelabuhan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan	Terbangunnya Dermaga/penyediaan disetiap daerah terisolir	Terbangunnya Dermaga/penyeberangan diwilayah Kabupaten Pesisir Selatan	PPTK	Juni s/d Desember 2019
Tujuan 6 : Untuk meningkatkan pelayanan jasa transportasi kepada pelajar dalam rangka menjemput/mengantarkan ke tempat tujuan sehingga terciptanya Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)					
1	Minimnya jasa transportasi bagi pelajar yang tinggal di daerah terisolir	Penambahan jumlah armada Bus Sekolah	Melayani kebutuhan pelajar akan jasa transportasi di setiap kecamatan yang membutuhkan	PPTK	Januari s/d Desember 2019
Tujuan 7 : Memberikan pelayanan/fasilitas kepada masyarakat dalam rangka menurunkan/menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi, mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum serta memberikan fasilitas parkir dalam pengaturan tempat kendaraan bermotor					
1	Tidak adanya tempat pemberhentian Bus dan fasilitas parkir sehingga tidak tertatanya arus kendaraan dengan baik	Peningkatan kualitas SDM dan pelayanan parkir	Pengisian kantong-kantong parkir di setiap objek wisata	PPTK	Januari s/d Desember 2019

1	2	3	4	5	6
Tujuan 8 : Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan dan melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan penggunaan kendaraan bermotor di jalan serta meningkatnya moda transportasi laik jalan					
1	Tidak adanya jaminan keselamatan secara teknis dan pencemaran udara	Peningkatan Kompetensi Penguji dan kualitas pelayanan kepada pemilik kendaraan bermotor	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya melakukan pengujian kendaraan bermotor sehingga kendaraan tersebut laik jalan dan terhindar dari resiko kecelakaan	PPTK	Januari s.d Desembr 2019
Tujuan 9 : Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan penerangan jalan umum					
	Kurangnya penerangan jalan umum bagi pengguna jalan dan masyarakat pada malam hari sehingga jalan yang dilalui tidak dapat lihat dengan jelas	Survey ke lokasi untuk menentukan pemasangan penerangan jalan umum di seluruh titik yang rawan kecelakaan	Melakukan pendataan terhadap kebutuhan PJU yang dibutuhkan/di pasang disetiap Nagari dan Kecamatan	PPTK	April s/d Desember 2019

1	2	3	4	5	6
Tujuan 10 : Adanya petunjuk atau arah bagi pengguna jalan sehingga kecelakaan dapat di minimalisir					
1	Kurangnya petunjuk atau arah bagi pengguna jalan sehingga dapat mengakibatkan kecelakaan	Survey ke lokasi untuk menentukan pemasangan RPPJ pada lokasi yang rawan kecelakaan	Melakukan pendataan terhadap kebutuhan RPPJ yang dibutuhkan/di pasang disetiap lokasi rawan kecelakaan	PPTK	Juni s/d Desember 2019
Tujuan 11 : Tersedianya sarana alat keselamatan Lalu Lintas					
1	Kurangnya tersedianya sarana alat keselamatan lalu lintas	Survey ke lokasi untuk menentukan pemasangan Fasilitas keselamatan pada lokasi yang rawan kecelakaan	Melakukan pendataan terhadap kebutuhan fasilitas keselamatan yang dibutuhkan/di pasang disetiap lokasi rawan kecelakaan	PPTK	Juni s/d Desember 2019
Tujuan 12 : Adanya pemahaman pemilik kapal dan pengguna jasa transportasi angkutan laut akan pentingnya keselamatan dalam pengoperasian kapal dan berlalu lintas di laut					
1	Kurangnya aparatur yang memiliki kompetensi dibidang penertiban dan pembinaan lalu lintas angkutan laut	Penambahan anggaran	Sosialisasi terhadap pemilik kapal tentang keselamatan pelayaran, penerbitan pas kecil dibawah GT 7 & kelengkapan dok. kapal disetiap Kec.	PPTK	Januari s/d Desember 2019

1	2	3	4	5	6
Tujuan 13 : Terpilihnya pelajar pelopor keselamatan berlalu lintas yang akan menjadi duta keselamatan ditingkat pelajar					
1	Kurangnya informasi kepada pelajar akan pentingnya keselamatan di jalan	Pemilihan pelajar pelopor keselamatan berlalu lintas pada tiap-tiap sekolah	Melakukan sosialisasi keselamatan berlalu lintas, masing-masing 2 sekolah setiap Kecamatan yang ada diwilayah Kabupaten Pesisir Selatan	PPTK	Februari s/d April 2019
Tujuan 14 : Terpilihnya sopir teladan dalam rangka memotivasi sopir-sopir lainnya untuk tertib dalam berkendara dan memperhatikan faktor keselamatan penumpang					
1	Minimnya pengetahuan sopir akan etika dan berlalu lintas sehingga dapat mengakibatkan kecelakaan	Pemilihan sopir teladan tingkat Kecamatan	Memberikan pelatihan/workshop kepada para sopir tentang tata cara berkendara yang baik	PPTK	Juni s/d Desember 2019
Tujuan 15 : Terciptanya arus lalu lintas yang aman, lancar, tertib, terkendali dan selamat					
1	Kurangnya pemenuhan aparatur dalam pemberian pelayanan terhadap pengamanan Jalan yang mengatur arus lalu lintas	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam pengawasan dan pengendalian arus lalu lintas	Pemberian pelatihan dasar lalu lintas angkutan dan jalan bagi petugas STPJ	PPTK	Januari s/d April 2019

1	2	3	4	5	6
Tujuan 16 : Terciptanya ketertiban dan kepatuhan pemilik dan pengguna kapal dalam pengoperasian kapal dalam rangka meningkatkan keselamatan					
1	Kurangnya pemenuhan aparatur dalam pemberian pelayanan pengamanan lalu lintas angkutan laut	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam pengawasan dan pengendalian arus lalu lintas angkutan laut	Pemeriksaan alat keselamatan pelayaran (kapal) dan muatan/jumlah penumpang kapal	PPTK	Januari s/d Desember 2019
Tujuan 17 : Untuk meningkatkan penyelenggaraan transportasi yang handal, berkelanjutan dan menjamin kesamaan hak pengguna jalan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam disiplin berlalu-lintas					
1	Kurangnya kesadaran masyarakat mencintai budaya tertib berlalu lintas	Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam tertib berlalu lintas	Pemberian sosialisasi tertib berlalu lintas kepada masyarakat pengguna jalan dalam rangka penilaian Wahana Tata Nugraha Kategori Kota Kecil	PPTK	Maret s/d Oktober 2019



## Lampiran 4

## Rencana Informasi Dan Komunikasi Pengendalian

No	Tujuan	Pengendalian yang direncanakan	Media/Bentuk/Sarana/Pengomunikan	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7
1	Tersedianya alat keselamatan lalu lintas dalam kondisi baik	Merehabilitasi seluruh alat keselamatan jalan yang rusak dan mengembalikan fungsi rambu-rambu sebagai media informasi bagi pengguna jalan	Rapat, surat tugas, laporan kegiatan, laporan dari petugas/masyarakat dan data Aset	PPTK dan Kabid Prasarana	Dinas Perhubungan dan Masyarakat	Februari s/d Desember 2019
2	Berfungsi dan adanya fasilitas di pos retribusi sebagaimana mestinya	Rehabilitasi ke tiga Pos Retribusi (TPR) yaitu Pos Terpadu Panadah, Pos Retribusi Siguntur dan Terminal Silaut	Rapat, surat, surat tugas dan laporan petugas pemungut retribusi	PPTK	Dinas Perhubungan, petugas pemungut retribusi dan masyarakat	
3.	Tersedianya penerangan jalan umum dalam kondisi baik dan berfungsi sebagaimana mestinya	Melakukan pendataan terhadap penerangan jalan umum yang rusak di setiap Nagari dan Kecamatan agar dapat direhabilitasi	Rapat koordinasi, surat, surat tugas, laporan kegiatan dan data penerangan jalan umum, WA, SMS dan Telepon	PPTK	Dinas Perhubungan dan Masyarakat	Januari s/d Desember 2019

1	2	3	4	5	6	7
4.	Memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana transportasi pedesaan	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana transportasi pedesaan bagi masyarakat terisolir yang ada diwilayah Kabupaten Pesisir Selatan sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat	Renja, Rapat, Surat dan surat tugas, internet, telepon	PPTK dan Kabid Prasara	Dinas Perhubungan dan masyarakat	Juni s/d Desember 2019
5.	Meningkatkan pengembangan pembangunan pelabuhan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan	Terbangunnya Dermaga/penyeberangan diwilayah Kabupaten Pesisir Selatan	Renja, Rapat, Surat dan surat tugas	PPTK dan Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Dinas Perhubungan dan masyarakat	Tahun 2020
6.	Untuk meningkatkan pelayanan jasa transportasi kepada pelajar dalam rangka menjemput/mengantarkan ke tempat tujuan sehingga terciptanya Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Melayani kebutuhan pelajar akan jasa transportasi di setiap kecamatan yang membutuhkan	Rapat, surat tugas dan laporan kegiatan	PPTK	Dinas Perhubungan, Pelajar dan masyarakat	Januari s/d Desember 2019

1	2	3	4	5	6	7
7.	Memberikan pelayanan/fasilitas kepada masyarakat dalam rangka menurunkan/menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi, mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum serta memberikan fasilitas perparkiran dalam pengaturan tempat kendaraan bermotor	Pengisian kantong-kantong parkir di setiap objek wisata	Rapat, Surat, surat tugas, karcis, laporan kegiatan, instruksi pimpinan, arahan lisan	PPTK dan Kabid Prasarana	Dinas Perhubungan, pemilik kendaraan dan masyarakat	Tahun 2020

1	2	3	4	5	6	7
8.	Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan dan melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan penggunaan kendaraan bermotor di jalan serta meningkatnya moda transportasi laik jalan	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya melakukan pengujian kendaraan bermotor sehingga kendaraan tersebut laik jalan dan terhindar dari resiko kecelakaan	Kendaraan, Buku Uji, Siker Uji, Plat Uji, Amprah, SKRD, Laptop dan Printer	PPTK dan Kabid Lalu Lintas dan Angkutan	Masyarakat pemilik kendaraan yang melakukan KIR	Tahun 2020
9.	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan penerangan jalan umum	Melakukan pendataan terhadap kebutuhan PJU yang dibutuhkan/dipasang disetiap Nagari dan Kecamatan	Rapat koordinasi, surat, surat tugas, laporan kegiatan dan data penerangan jalan umum	PPTK dan Kabid Prasarana	Dinas Perhubungan dan Masyarakat	April/desember 2019

1	2	3	4	5	6	7
10.	Adanya petunjuk atau arah bagi pengguna jalan sehingga kecelakaan dapat di minimalisir	Melakukan pendataan terhadap kebutuhan RPPJ yang dibutuhkan/dipasang di setiap lokasi rawan kecelakaan	Rapat koordinasi, surat, surat tugas, laporan kegiatan dan data RPPJ	PPTK dan Kabid Prasarana	Dinas Perhubungan dan Masyarakat	Juni s/d Desember 2019
11.	Tersedianya sarana alat keselamatan Lalu Lintas	Melakukan pendataan terhadap kebutuhan fasilitas keselamatan yang dibutuhkan/dipasang di setiap lokasi rawan kecelakaan	Rapat koordinasi, surat, surat tugas, laporan kegiatan dan data alat keselamatan lalu lintas	PPTK dan Kabid Prasarana	Dinas Perhubungan dan Masyarakat	Juni s/d Desember 2019
12.	Adanya pemahaman pemilik kapal dan pengguna jasa transportasi angkutan laut akan pentingnya keselamatan dalam pengoperasian kapal dan berlalu lintas di laut	Sosialisasi terhadap pemilik kapal tentang keselamatan pelayaran, penerbitan pas kecil dibawah GT 7 dan kelengkapan dokumen kapal di setiap Kecamatan	Rapat, surat tugas, surat undangan, Spanduk, Makalah/bahan sosialisasi, laporan kegiatan, ATK dan daftar hadir peserta	PPTK dan Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Dinas Perhubungan, Pemilik kapal dan pengguna jasa transportasi laut	Januari s/d Desember 2019

1	2	3	4	5	6	7
13.	Terpilinya pelajar pelopor keselamatan berlalu lintas yang akan menjadi duta keselamatan ditingkat pelajar	Melakukan sosialisasi keselamatan berlalu lintas, masing-masing 2 sekolah setiap Kecamatan yang ada diwilayah Kabupaten Pesisir Selatan	Rapat, surat tugas, surat undangan, laporan kegiatan, makalah, daftar hadi peserta, ATK dan formulir penilaian	PPTK dan Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Dinas Perhubungan, Pihak sekolah dan Pelajar	Tahun 2020
14.	Terpilinya sopir teladan dalam rangka memotivasi sopir-sopir lainnya untuk tertib dalam berkendara dan memperhatikan faktor keselamatan penumpang	Memberikan pelatihan/workshop kepada para sopir tentang tata cara berkendara yang baik	Rapat, surat tugas, surat undangan, laporan kegiatan, makalah, daftar hadir peserta, ATK dan formulir penilaian	PPTK dan Kabid Lalu Lintas dan Angkutan	Dinas Perhubungan dan Sopir	Tahun 2020
15.	Terciptanya arus lalu lintas yang aman, lancar, tertib, terkendali dan selamat	Pemberian pelatihan dasar lalu lintas angkutan dan jalan bagi petugas STPJ	Rapat, surat tugas, instruksi pimpinan, arahan lisan dan laporan petugas STPJ	PPTK dan Kabid Lalu Lintas dan Angkutan	Dinas Perhubungan, masyarakat pengguna jalan	Tahun 2020

1	2	3	4	5	6	7
16.	Terciptanya ketertiban dan kepatuhan pemilik dan pengguna kapal dalam pengoperasian kapal dalam rangka meningkatkan keselamatan	Pemeriksaan alat keselamatan pelayaran (kapal) dan muatan/jumlah penumpang kapa	Rapat, surat tugas, instruksi pimpinan, arahan lisan dan laporan petugas	PPTK dan Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Dinas Perhubungan, Pemilik kapal dan pengguna jasa transportasi laut	Januari s/d Desember 2019
17.	Untuk meningkatkan penyelenggaraan transportasi yang handal, berkelanjutan dan menjamin kesamaan hak pengguna jalan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam disiplin berlalu-lintas	Pemberian sosialisasi tertib berlalu lintas kepada masyarakat pengguna jalan dalam rangka penilaian Wahana Tata Nugraha Kategori Kota Kecil	Rapat koordinasi, surat undangan, surat tugas, laporan kegiatan dan pengisian formulir penilaian WTN	PPTK dan Kabid Lalu Lintas dan Angkutan	Tim penilai, Dinas Perhubungan dan masyarakat pengguna jalan	Tahun 2020

Lampiran 5

Rancangan Pemantauan Berkelanjutan Atas Pengendalian

No	Tujuan	Pengendalian yang direncanakan	Bentuk/ Metode Pemantauan yang diperlukan	Penanggungjawab Pelaksanaan Pemantauan	Waktu Pelaksanaan Pemantauan
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya alat keselamatan lalu lintas dalam kondisi baik	Merehabilitasi seluruh alat keselamatan jalan yang rusak dan mengembalikan fungsi rambu-rambu sebagai media informasi bagi pengguna jalan	Sudah ada (PPTK)	Atasan langsung	Februari s/d Desember 2019
2	Berfungsi dan adanya fasilitas di pos retribusi sebagaimana mestinya	Rehabilitasi ke tiga Pos Retribusi (TPR) yaitu Pos Terpadu Panadah, Pos Retribusi Siguntur dan Terminal Silaut	Sudah ada (PPTK)	Atasan langsung	
3.	Tersedianya penerangan jalan umum dalam kondisi baik dan berfungsi sebagaimana mestinya	Melakukan pendataan terhadap penerangan jalan umum yang rusak di setiap Nagari dan Kecamatan agar dapat direhabilitasi	Sudah ada (PPTK)	Atasan langsung	Januari s/d Desember 2019



1	2	3	4	5	6
4.	Memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana transportasi pedesaan	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana transportasi pedesaan bagi masyarakat terisolir yang ada di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat	sudah ada (PPTK)	Atasan langsung	Juni s/d Desember 2019
5.	Meningkatkan pengembangan pembangunan pelabuhan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan	Terbangunnya Dermaga/penyeberangan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan	Belum ada	Atasan langsung	Tahun 2020
6.	Untuk meningkatkan pelayanan jasa transportasi kepada pelajar dalam rangka menjemput/mengantarkan ke tempat tujuan sehingga terciptanya Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Melayani kebutuhan pelajar akan jasa transportasi di setiap kecamatan yang membutuhkan	sudah ada (PPTK)	Atasan langsung	Januari s/d Desember 2019

1	2	3	4	5	6
7.	<p>Memberikan pelayanan/fasilitas kepada masyarakat dalam rangka menurunkan/menaikan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi, mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum serta memberikan fasilitas perparkiran dalam pengaturan tempat kendaraan bermotor</p>	<p>Pengisian kantong-kantong parkir di setiap objek wisata</p>	<p>Belum ada</p>	<p>Atasan langsung</p>	<p>Tahun 2020</p>
8.	<p>Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan dan melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan penggunaan kendaraan bermotor di jalan serta meningkatnya moda transportasi laik jalan</p>	<p>Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya melakukan pengujian kendaraan bermotor sehingga kendaraan tersebut laik jalan dan terhindar dari resiko kecelakaan</p>	<p>Belum ada</p>	<p>Atasan langsung</p>	<p>Tahun 2020</p>

1	2	3	4	5	6
9.	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan penerangan jalan umum	Melakukan pendataan terhadap kebutuhan PJU yang dibutuhkan/dipasang disetiap Nagari dan Kecamatan	sudah ada (PPTK)	Atasan langsung	April s/d Desember 2019
10	Adanya petunjuk atau arah bagi pengguna jalan sehingga kecelakaan dapat di minimalisir	Melakukan pendataan terhadap kebutuhan RPPJ yang dibutuhkan/dipasang disetiap lokasi rawan kecelakaan	sudah ada (PPTK)	Atasan langsung	Juni s/d Desember 2019
11	Tersedianya sarana alat keselamatan Lalu Lintas	Melakukan pendataan terhadap kebutuhan fasilitas keselamatan yang dibutuhkan/dipasang disetiap lokasi rawan kecelakaan	sudah ada (PPTK)	Atasan langsung	Juni s/d Desember 2019
12	Adanya pemahaman pemilik kapal dan pengguna jasa transportasi angkutan laut akan pentingnya keselamatan dalam pengoperasian kapal dan berlalu lintas di laut	Sosialisasi terhadap pemilik kapal tentang keselamatan pelayaran, penerbitan pas kecil dibawah GT 7 dan kelengkapan dokumen kapal disetiap Kecamatan	sudah ada (PPTK)	Atasan langsung	Januari s/d Desember 2019

1	2	3	4	5	6
13	Terpilihnya pelajar pelopor keselamatan berlalu lintas yang akan menjadi duta keselamatan ditingkat pelajar	Melakukan sosialisasi keselamatan berlalu lintas, masing-masing 2 sekolah setiap Kecamatan yang ada diwilayah Kabupaten Pesisir Selatan	Belum ada	Atasan langsung	Tahun 2020
14	Terpilihnya sopir teladan dalam rangka memotivasi sopir-sopir lainnya untuk tertib dalam berkendara dan memperhatikan faktor keselamatan penumpang	Memberikan pelatihan/workshop kepada para sopir tentang tata cara berkendara yang baik	Belum ada	Atasan langsung	Tahun 2020
15	Terciptanya arus lalu lintas yang aman, lancar, tertib, terkendali dan selamat	Pemberian pelatihan dasar lalu lintas angkutan dan jalan bagi petugas STPJ	Belum ada	Atasan langsung	Tahun 2020

1	2	3	4	5	6
16	Terciptanya ketertiban dan kepatuhan pemilik dan pengguna kapal dalam pengoperasian kapal dalam rangka meningkatkan keselamatan	Pemeriksaan alat keselamatan pelayaran (kapal) dan muatan/jumlah penumpang kapal	Sudah ada (PPTK)	Atasan Langsung	Januari s/d Desember 2019
17	Untuk meningkatkan penyelenggaraan transportasi yang handal, berkelanjutan dan menjamin kesamaan hak pengguna jalan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam disiplin berlalu-lintas	Pemberian sosialisasi tertib berlalu lintas kepada masyarakat pengguna jalan dalam rangka penilaian Wahana Tata Nugraha Kategori Kota Kecil	Belum Ada	Atasan langsung	Tahun 2020

Mengetahui

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PESI SIR SELATAN



GUNAWAN, S.Sos. M.Si

NIP 9700204 199101 1 002